

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Jakarta :Bina Cipta.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Djaya, Ermansjah. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 2015 *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto, Budiman Setyo. 2011. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Purwokerto: UPT PERCETAKAN DAN PENERBITAN Universitas Jenderal Soedirman
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Makara, Muhammad Taufik dan Suharsil, 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Markeling, I Ketut. 2016. *Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris)*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Marpaung, Leden. 2004. *Perumusan Memori Kasasi dan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden. 2010 *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. Penemuan Hukum sebuah pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, H. Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. 2003. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Bandung: PT Alumni.
- Prasetyo, Ridwan Eko. 2010. Hukum Acara Pidana. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rudyat, Charlie. Kamus Hukum Edisi Lengkap. Pustaka Mahardika
- Salam, Moch. Faisal. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek. Bandung: Mandar Maju.
- Sapardjadja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1999. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2005. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Kencana.
- Soeparman, Parman. 2009. Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soeroso, R. 2013. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan, Andi. 2013. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Subekti, Trusto, dkk. 2018. Bahan Pembelajaran Hukum Waris Adat. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Sudarto. 1990. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru.

Sumitro, Ronny Hatijo. 2005. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Kencana.

Suparman, Maman. 2017. Hukum Waris Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutiyoso, Bambang. 2015. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

#### **Jurnal Dan Karya Ilmiah:**

Adhyanti, Hijrah. 2014. Buletin Eksepsi: PK dalam Hukum Acara Pidana (kepastian hukum versus keadilan), *Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin*, Makasar.

Askin, Moh. 2015. Dinamika Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. *Varia Peradilan*. No. 352 Maret 2015.

Fality, Firmansyah. 2017. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006. *jurnal Yustisiabel* Volume 1 Nomor 1.

Hikmawati,Puteri. 2013. Polemik Putusan Peninjauan Kembali Sudjiono Timan, *Info Singkat Hukum*, Volume V, Nomor 17/I/PD3I/September.

Kartika, Shanty Dwi, 2014. Peninjauan Kembali Sudjiono lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Info Singkat Hukum*, Volume VI, Nomor 6/II/PD3I/Maret.

Lumempouw, Bilryan. 2013. Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Crimen* Volume 2 Nomor 3, Edisi Juli 2013.

Ramiyanto. 2016. Makna Ahli Waris Sebagai Subjek Pengajuan Peninjauan Kembali. *Jurnal Yudisial* Volume 9 Nomor 1.

Wipram, Hari. 2014. *Eksistensi Ahli Waris Terpidana Dalam Permohonan Peninjauan Kembali*. *Varia Peradilan*, No. 340 Maret 2014.

#### **Internet:**

\_\_\_\_\_. *Akhirnya MK Larang Jaksa Ajukan PK*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5734711a1fc21/akhirnya-mk-larang-jaksa-ajukan-pk/> pada 30 April 2020.

\_\_\_\_\_. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ahli> pada tanggal 28 Juli 2020.

\_\_\_\_\_. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waris>. pada tanggal 28 Juli 2020.

\_\_\_\_\_. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ahli%20waris>. pada tanggal 28 Juli 2020.

\_\_\_\_\_. *Kekeliruan dan Kekhilafan Hakim Menjadi Alasan Peninjauan Kembali*, Diakses dari <https://www.litigasi.co.id/hukum-acara/60/kekeliruan-dan-kekhilafan-hakim-menjadi-alasan-peninjauan-kembali> pada 30 April 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Kompilasi Hukum Islam.